

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam pembentukan fondasi moral, etika, dan spiritual peserta didik. Di tengah dinamika kehidupan sosial yang terus berubah, pembelajaran agama tidak sekadar berfungsi sebagai transfer pengetahuan (*transfer of knowledge*), melainkan juga sebagai proses pembentukan karakter (*transfer of values*) yang menuntun anak menuju kedewasaan yang berakhlak mulia. Pemahaman keagamaan yang kokoh sejak usia dini menjadi benteng utama bagi generasi muda dalam menghadapi arus globalisasi dan pergeseran nilai-nilai budaya. Nilai-nilai ajaran Islam yang ditanamkan secara konsisten akan terinternalisasi dalam sanubari peserta didik, yang pada akhirnya menentukan pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku mereka, baik dalam kehidupan berkeluarga, berinteraksi di lingkungan sekolah, bertetangga di tengah masyarakat, hingga pertanggungjawaban di akhirat kelak. Allah memerintahkan atas wajibnya belajar dalam Q.S Al Mujadilah ayat 11, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis”, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Mujadilah (58) 11)

Ayat tersebut menggarisbawahi bahwa derajat dan kemuliaan seseorang di hadapan Allah SWT sangat ditentukan oleh keimanan dan tingkat keilmuan yang dimilikinya. Dalam konteks pendidikan Islam, ilmu agama merupakan dasar dari segala ilmu lainnya, karena melalui pemahaman agama yang benar, seseorang mampu membedakan antara hal yang hak dan yang batil, serta mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan bagi kemaslahatan bersama. Relevansi ayat tersebut dengan pembiasaan membaca Al-Qur'an pada usia dini terletak pada

kedudukan ilmu Al-Qur'an sebagai dasar dari segala bentuk literasi keagamaan. Mengangkat derajat melalui ilmu sebagaimana dijanjikan dalam Q.S. Al-Mujadilah [58]: 11 dimulai dari tingkatan paling mendasar, yakni kelancaran dan pemahaman bacaan Al-Qur'an. Melalui program Wajib Diniyah, pembiasaan membaca Al-Qur'an secara bertahap dan terstruktur sejak usia sekolah dasar/diniyah menjadi fondasi penting agar peserta didik memiliki kesiapan kognitif dan spiritual dalam menyerap ilmu-ilmu agama pada jenjang berikutnya.

Namun demikian, realitas kehidupan pada era digital saat ini menunjukkan tantangan yang kian berat dan kompleks dalam pelaksanaan pendidikan keagamaan anak. Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat membuat anak-anak usia sekolah dasar telah dikenalkan dan berinteraksi secara intensif dengan *smartphone* atau tenggelam dalam lingkungan serba digital. Penggunaan gadget tanpa batas serta minimnya pendampingan dari orang tua berdampak pada teralihkannya minat dan perhatian anak-anak dari kegiatan-kegiatan keagamaan tradisional, seperti belajar mengaji Maghrib maupun menimba ilmu di Madrasah Diniyah Takmiliyah. Waktu luang anak yang seharusnya dimanfaatkan untuk memperdalam literasi Al-Qur'an dan memahami dasar-dasar akidah-akhlak kini tersita oleh gim daring, media sosial, dan tayangan hiburan digital. Dampak buruk dari fenomena ini terasa amat nyata ketika anak-anak tersebut menuntaskan pendidikan di tingkat sekolah dasar dan melangkah ke jenjang sekolah menengah. Banyak pendidik di tingkat sekolah menengah mendapati kenyataan bahwa sejumlah besar siswa baru belum menguasai dasar-dasar ajaran Islam secara memadai, bahkan tidak sedikit yang belum lancar membaca Al-Qur'an atau masih berada pada tingkat kemampuan membaca yang sangat mendasar (Fajar Aswati, 2025). Masalah ini diperparah oleh keterbatasan alokasi waktu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah formal jalur umum yang secara kurikulum rata-rata hanya dialokasikan sebanyak 2 hingga 3 jam pelajaran per minggu. Durasi yang sangat terbatas tersebut tentu tidak cukup untuk memfasilitasi pembelajaran agama yang mendalam, mencakup praktik ibadah, bimbingan tajwid, penanaman akidah, hingga pembiasaan akhlakul karimah.

Melihat keterbatasan kurikulum PAI di sekolah formal tersebut, kehadiran pendidikan keagamaan Islam nonformal menjadi sebuah keniscayaan. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama telah memberikan payung hukum melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Dalam regulasi ini, disebutkan bahwa Madrasah Diniyah Takmiliyah merupakan lembaga pendidikan keagamaan Islam pada jalur nonformal yang diselenggarakan secara terstruktur dan bertingkat (Ali, 2014). MDT dirancang khusus untuk melengkapi, memperdalam, dan memperkuat pendidikan agama Islam yang diterima peserta didik di sekolah dasar, sekolah menengah, hingga perguruan tinggi. Melalui MDT, anak-anak tidak hanya diajarkan cara membaca Al-Qur'an, tetapi juga dibekali ilmu-ilmu syariat dasar seperti fiqh ibadah, sejarah kebudayaan Islam, bahasa Arab dasar, serta bimbingan akhlak.

Dalam skala daerah, Pemerintah Kabupaten Bandung memiliki komitmen dan respons strategis yang sangat progresif terhadap isu pendidikan keagamaan ini. Kabupaten Bandung merupakan salah satu daerah pionir yang menerbitkan regulasi khusus, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah. Regulasi ini kemudian ditindaklanjuti secara teknis melalui Peraturan Bupati Bandung Tahun 2009 tentang Hak dan Kewajiban Peserta Didik. Dalam Pasal 14 dan 15 aturan tersebut, ditegaskan bahwa peserta didik yang mengikuti Pendidikan Wajib Diniyah berhak memperoleh ijazah resmi, di mana ijazah ini diatur sebagai salah satu dokumen persyaratan administratif yang wajib dilampirkan ketika peserta didik hendak melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi (Sobarna, 2008). Kebijakan ini dihadirkan dengan harapan agar setiap anak muslim di Kabupaten Bandung mendapatkan pembinaan agama yang terstruktur, sehingga terbentuk karakter peserta didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia di tengah kehidupan bermasyarakat.

Meskipun kebijakan Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Bandung telah digulirkan dan berjalan selama kurang lebih 18 tahun, faktanya masih terdapat kesenjangan yang mencolok antara kondisi ideal yang diamanatkan oleh peraturan dengan fakta empiris yang terjadi di lapangan. Kesenjangan ini tercermin dari pernyataan resmi Bupati Bandung, Dr. H. M. Dadang Supriatna,

S.Ip., M.Si., dalam berbagai forum daerah. Beliau mengungkapkan keprihatinannya terkait tingkat literasi Al-Qur'an masyarakat dan pelajar di Kabupaten Bandung yang tercatat masih rendah, yakni hanya sekitar 23% masyarakat yang tergolong lancar dan mampu membaca Al-Qur'an dengan baik. Angka ini menandakan bahwa mayoritas peserta didik dan generasi muda masih berada dalam kategori belum lancar atau bahkan buta aksara Al-Qur'an (Nugraha, 2026).

Rendahnya pemahaman membaca Al-Qur'an tersebut berakar dari berbagai faktor kompleks. Salah satu faktor dominan berasal dari dalam diri peserta didik itu sendiri (*internal factor*), yakni munculnya rasa malas untuk mengaji akibat adiksi terhadap gadget dan gim daring. Faktor ini diperparah oleh kurangnya dorongan, pembiasaan, serta pengawasan dari lingkungan keluarga (*external factor*), sehingga anak-anak enggan untuk melangkahhkan kaki mengikuti kegiatan pembelajaran di madrasah diniyah atau TPA di lingkungan tempat tinggal mereka (Nurdiana, 2022). Akibatnya, keberadaan program wajib belajar diniyah kerap kali hanya dimaknai sebatas pemenuhan kewajiban administratif belaka untuk mendapatkan lembar ijazah, tanpa diimbangi oleh kesadaran substansial akan pentingnya menyerap nilai-nilai ajaran agama.

Perkembangan teknologi digital yang sangat masif tidak hanya membawa dampak positif bagi kemudahan akses informasi, tetapi juga memicu disrupsi budaya dan nilai-nilai sosial-keagamaan pada rentang usia anak-anak. Anak usia sekolah dasar, khususnya yang berada pada masa transisi menuju remaja awal, rentan mengalami *cyber-addiction* dan *screen time* berlebihan. Penggunaan gawai secara intensif tanpa filter pengawasan orang tua secara bertahap mengikis habituasi keagamaan seperti mengaji setelah Maghrib, membaca Al-Qur'an, dan melaksanakan ibadah tepat waktu. Dalam perspektif psikologi perkembangan Islam, teralirnya perhatian anak pada hiburan digital menyebabkan kekosongan spiritual dan penurunan pemahaman nilai-nilai dasar agama Islam.

Keberadaan Madrasah Diniyah Takmiliah (MDT) memiliki peran strategis sebagai sarana *complementary education* atau pendidikan pelengkap dan penyeimbang. Sekolah formal di jalur umum pada kenyataannya menghadapi keterbatasan alokasi jam pelajaran PAI yang rata-rata hanya 2 hingga 3 jam

pelajaran per minggu. Durasi singkat tersebut sering kali hanya cukup untuk menyampaikan ranah kognitif tingkat dasar tanpa diimbangi oleh bimbingan praktik ibadah yang intensif, pembiasaan baca-tulis Al-Qur'an (BTQ) sesuai tajwid, serta penguatan hafalan doa dan surah pendek. Oleh karena itu, sinergi antara regulasi daerah melalui Perda Kab. Bandung No. 7 Tahun 2008 dan kelembagaan MDT menjadi kunci utama untuk membentengi moralitas peserta didik dari dampak negatif era digitalisasi.

Kondisi kesenjangan tersebut di atas secara nyata juga ditemukan oleh peneliti di lapangan saat melakukan observasi awal di Madrasah Diniyah Takmiliyah Bintang Raya, Kabupaten Bandung, sebagai salah satu lembaga pelaksana program Wajib Belajar Diniyah, MDT Bintang Raya menghadapi berbagai kendala substantif dalam proses pembelajarannya. Berdasarkan pengamatan dan wawancara pendahuluan, ditemukan bahwa tingkat partisipasi dan tingkat kehadiran peserta didik belum konsisten. Banyak murid yang terdaftar secara administratif jarang menghadiri kegiatan belajar-mengajar. Mereka cenderung memilih membolos atau menyita waktunya untuk bermain smartphone bersama teman sebaya di luar kelas. Selain itu, motivasi belajar santri yang hadir pun tergolong minim, yang berimplikasi langsung pada rendahnya penguasaan materi-materi dasar keagamaan, seperti hafalan surah-surah pendek, tata cara salat yang benar, hingga pemahaman akhlak dasar.

Berdasarkan paparan fenomena di atas, letak urgensi penelitian dan kesenjangan penelitian ini menjadi sangat jelas dan mendesak untuk diteliti. Secara teoritis dan praktis, kebijakan Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Bandung telah diimplementasikan selama hampir dua dekade. Namun, sejauh mana regulasi daerah yang bernilai strategis ini efektif dalam meningkatkan pemahaman keagamaan peserta didik di tingkat tapak masih memunculkan pertanyaan besar. Kehadiran Perda dan syarat ijazah diniyah terbukti belum secara otomatis mampu menyelesaikan persoalan mendasar terkait maraknya adiksi gadget, penurunan minat mengaji, serta rendahnya literasi Al-Qur'an pada diri siswa. Sebagian besar kajian atau evaluasi yang ada selama ini cenderung berfokus pada aspek administratif kepatuhan sekolah atau pemenuhan sarana dan prasarana fisik

madrasah. Masih sangat terbatas penelitian yang secara kualitatif mendalam mengevaluasi keefektifan substansial dari program ini, yakni mengukur sejauh mana program Pendidikan Wajib Diniyah benar-benar mentransformasi dan meningkatkan pemahaman keagamaan, kualitas bacaan Al-Qur'an, serta pembentukan karakter Islam pada diri peserta didik di lembaga MDT.

Oleh karena itu, evaluasi mendalam mengenai keefektifan program ini di MDT Bintang Raya sangat penting untuk dilakukan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris yang objektif mengenai tingkat keberhasilan, kendala utama, serta faktor pendukung pelaksanaan program Wajib Diniyah. Lebih jauh, temuan dalam penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan, evaluasi, dan pembuatan kebijakan lanjutan bagi pengelola lembaga, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pendidikan keagamaan di Kabupaten Bandung. Berangkat dari latar belakang masalah, kesenjangan antara regulasi dan realitas, serta urgensi ilmiah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mendalam dengan judul: “Implementasi Program Pendidikan Wajib Diniyah dalam Mengembangkan Pemahaman Bacaan Al-Qur'an Peserta Didik Kelas VI di MDT Bintang Raya”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, rumusan masalah yang dapat penulis sajikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Program Pendidikan Wajib Diniyah di MDT Bintang Raya Cikancung Bandung?
2. Bagaimana gambaran pemahaman bacaan Al-Qur'an peserta didik kelas VI di MDT Bintang Raya setelah mengikuti Program Pendidikan Wajib Diniyah?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Program Pendidikan Wajib Diniyah untuk mengembangkan pemahaman bacaan Al-Qur'an peserta didik di MDT Bintang Raya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Program Pendidikan Wajib Diniyah di MDT Bintang Raya Cikancung Bandung.
2. Untuk mendeskripsikan pemahaman bacaan Al-Qur'an peserta didik kelas VI di MDT Bintang Raya setelah mengikuti Program Pendidikan Wajib Diniyah.
3. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Program Pendidikan Wajib Diniyah untuk mengembangkan pemahaman bacaan Al-Qur'an peserta didik di MDT Bintang Raya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti, baik secara akademis dalam ranah pengembangan keilmuan maupun secara praktis bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pendidikan keagamaan. Adapun manfaat dari penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan khazanah keilmuan Pendidikan Agama Islam, khususnya yang berkaitan dengan teori evaluasi kebijakan dan keefektifan program pendidikan keagamaan nonformal. Penelitian ini dapat memperkaya kajian ilmiah mengenai bagaimana kebijakan pemerintah daerah seperti program Wajib Belajar Diniyah mampu berintegrasi dengan lembaga pendidikan masyarakat dalam mentransformasi dan meningkatkan pemahaman keagamaan peserta didik di era digital. Selain itu, temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau referensi akademis bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji keefektifan regulasi pendidikan Islam.

2. Manfaat praktis

Implementasi kebijakan dan program operasionalisasi pendidikan keagamaan pada Madrasah Diniyah Takmiliah (MDT) tidak dapat berdiri sendiri secara terisolasi. Keberhasilan, keberlanjutan, serta kualitas output

pembentukan karakter santri sangat bergantung pada sinergi tiga pilar pemangku kepentingan utama: tenaga pendidik di madrasah, lingkungan keluarga di rumah, dan otoritas pemerintah sebagai regulator. Masing-masing elemen memberikan kontribusi substantif yang saling menguatkan sebagai berikut:

- a. Guru dan tenaga pendidik tidak hanya berperan sebagai pengajar di dalam kelas, melainkan sebagai garis terdepan yang mengeksekusi kurikulum dan berinteraksi langsung dengan dinamika belajar peserta didik. Kontribusi strategis mereka meliputi: Pertama, penyedia masukan berbasis evaluasi pembelajaran Real-Time, melalui pengalaman mengajar harian, guru menjadi pihak pertama yang memahami peta kemampuan dasar, tingkat kelelahan fisik santri pasca-sekolah formal, serta keefektifan metode pengajaran. Masukan dari guru sangat krusial untuk menyempurnakan kurikulum, memadatkan materi agar lebih aplikatif, serta merancang metode pengajaran yang interaktif dan ramah anak. Kedua, Inovator Metode Pembelajaran Keagamaan, pendidik mengevaluasi keefektifan media pembelajaran (seperti penggunaan lagu Islami, teknik *peer learning*, dan muraja'ah kelompok) guna mengatasi rasa bosan santri serta meminimalkan ketergantungan mereka pada gawai. Ketiga, Pengawal Kualitas Mutu dan Karakter, guru bertanggung jawab mengawasi ketercapaian target hafalan doa, bacaan salat, dan surah pendek, sekaligus menjadi *role model* dalam membina kedisiplinan serta tata krama santri.
- b. Orang tua merupakan mitra sejajar madrasah yang memegang peranan kunci dalam menjamin keberlanjutan proses pembelajaran di lingkungan rumah. Kontribusi dan dampak positifnya meliputi: Pertama, peningkatan kesadaran kritis akan pentingnya benteng moral, proses partisipasi orang tua menyadarkan mereka bahwa pendidikan Diniyah bukan sekadar formalitas administratif untuk berburu sertifikat atau ijazah kelulusan semata. Pendidikan Diniyah difahami secara mendalam sebagai fondasi akidah, benteng moral, serta sarana pembentukan karakter anak di tengah derasnya arus modernisasi dan distraksi media digital. Kedua, Penguat

Pengawasan dan Kontrol Kebiasaan Ibadah di Rumah, melalui instrumen Buku Mutaba'ah Ibadah, orang tua bertindak sebagai penyambung lidah guru di rumah. Orang tua secara aktif memantau pelaksanaan salat lima waktu, mendampingi muraja'ah hafalan harian, serta menerapkan aturan kedisiplinan penggunaan handphone sebelum target belajar santri terpenuhi. Ketiga, penciptaan ekosistem belajar yang kondusif, dukungan emosional dan apresiasi dari orang tua di rumah memberikan dorongan motivasi bagi santri untuk tetap bersemangat menghadiri Diniyah di sore hari meskipun merasa lelah setelah menempuh pendidikan formal sejak pagi.

- c. Pemerintah bertindak sebagai pengampu kebijakan makro, penyedia regulasi, serta penjamin kepastian hukum dan mutu fasilitas pendidikan keagamaan. Kontribusi strategis pemanfaatan data dari lapangan meliputi: Pertama, basis data aktual untuk perencanaan kebijakan yang aksesibel, rekam data empiris mengenai tingkat partisipasi santri, kendala operasional, dan keefektifan kurikulum Diniyah memberikan masukan objektif berbasis bukti bagi pemerintah. Data ini sangat berguna untuk merancang regulasi, program pembinaan, maupun alokasi bantuan operasional yang lebih tepat sasaran. Kedua, peningkatan standardisasi mutu dan kemitraan kelembagaan, pemerintah dapat memanfaatkan masukan dari lembaga madrasah dan wadah seperti Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) untuk memetakan kebutuhan pelatihan kompetensi guru, penyelarasan standar lulusan Diniyah Dasar, serta penguatan legalitas lembaga pendidikan nonformal. Ketiga, Integrasi Kebijakan Pendidikan Keagamaan dan Karakter Daerah, informasi dari lapangan membantu pemerintah daerah dan Kementerian Agama untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan program wajib Diniyah, sehingga program tersebut dapat terus disempurnakan dan diselaraskan dengan agenda pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia di tingkat lokal maupun nasional.

E. Kerangka Berpikir

Implementasi merupakan salah satu tahapan paling krusial dalam siklus kebijakan publik maupun manajemen program pendidikan. Sebuah rancangan kebijakan atau kurikulum yang disusun secara ideal tidak akan memberikan dampak nyata apabila tidak ditransformasikan ke dalam tindakan operasional di lapangan. Menurut Van Meter dan Van Horn (2021), implementasi kebijakan didefinisikan sebagai sekumpulan tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat pemerintah, maupun kelompok swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Dalam arena pendidikan keagamaan nonformal, proses implementasi ini mencakup keseluruhan dinamika manajemen operasional, pengorganisasian sumber daya manusia, pengalokasian sarana prasarana, hingga interaksi edukatif antara pendidik dan peserta didik dalam lingkungan lembaga pendidikan.

Suatu implementasi tidak hanya berurusan dengan mekanisme administratif belaka, melainkan melibatkan interaksi kompleks antara regulasi, sarana pendukung, dan komitmen para pelaksana di lapangan. Untuk membedah dan menganalisis bagaimana suatu program dijalankan secara empiris, George C. Edward III (2020) mengajukan sebuah pendekatan teoretis yang memetakan keberhasilan implementasi program ke dalam empat faktor determinan utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Faktor determinan pertama adalah komunikasi (*communication*).

Keberhasilan pelaksanaan suatu program sangat ditentukan oleh kejelasan, keakuratan, dan konsistensi informasi yang disampaikan kepada para pelaksana di lapangan. Dalam konteks implementasi Program Pendidikan Wajib Diniyah di Madrasah Diniyah Takmiliyah Bintang Raya, proses komunikasi ini mencakup bagaimana regulasi Peraturan Daerah, kebijakan teknis kementerian atau dinas terkait, serta arah kurikulum disosialisasikan oleh pengelola lembaga kepada para pendidik, peserta didik, dan orang tua santri. Komunikasi yang efektif memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan memiliki persepsi yang seragam mengenai tujuan, sasaran, materi ajar, serta kriteria keberhasilan pembelajaran yang ingin dicapai.

Sebaliknya, hambatan dalam komunikasi dapat memicu misinterpretasi dan ketidakselarasan pelaksanaan pembelajaran di ruang kelas.

2. Faktor determinan kedua adalah sumber daya (*resources*). Meskipun perintah dan aturan program telah dikomunikasikan secara jelas, implementasi program tidak akan berjalan secara optimal tanpa adanya dukungan sumber daya yang memadai. Menurut Edward III, sumber daya mencakup ketersediaan sumber daya manusia, yakni para pendidik atau ustaz yang memiliki kompetensi pedagogik, keahlian dalam bidang keilmuan Al-Qur'an, serta dedikasi mengajar yang tinggi. Selain itu, sumber daya juga mencakup fasilitas seperti ruang kelas yang kondusif, kitab Al-Qur'an, juz 'amma, papan tulis, modul pembelajaran diniyah, serta alokasi waktu belajar dan dana operasional yang memadai untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar di Madrasah Diniyah Takmiliyah Bintang Raya.
3. Faktor determinan ketiga adalah disposisi (*dispositions*). Disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, dan kecenderungan para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada ketaatan dan kesiapan para ustaz serta pengelola Madrasah Diniyah Takmiliyah Bintang Raya dalam menerima dan menjalankan mandat Program Pendidikan Wajib Diniyah. Apabila para pelaksana memiliki disposisi positif, dedikasi yang tinggi, serta rasa tanggung jawab moral terhadap pembinaan akhlak dan Al-Qur'an peserta didik, maka mereka akan berupaya mengatasi berbagai keterbatasan sarana demi tercapainya tujuan pembelajaran. Sebaliknya, apabila disposisi pelaksana cenderung pasif, maka program hanya akan berjalan sebagai rutinitas formalitas tanpa memberikan dampak nyata pada pemahaman peserta didik.
4. Faktor determinan keempat adalah struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Faktor ini berkaitan dengan keberadaan tata kerja, pembagian tugas, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur mekanisme kerja kelembagaan. Dalam lingkungan Madrasah Diniyah Takmiliyah Bintang Raya, struktur birokrasi ini diwujudkan melalui adanya pembagian jadwal mengajar yang teratur, penetapan sasaran kurikulum, mekanisme

presensi peserta didik, serta sistem evaluasi berkala terhadap perkembangan belajar santri. Struktur organisasi yang jelas dan SOP yang terintegrasi akan memudahkan pendidik dalam menjalankan proses pengajaran secara terukur dan terencana, sekaligus meminimalkan tumpang tindih peran dalam pengelolaan kegiatan pembelajaran.

Empat dimensi implementasi yang dirumuskan oleh Edward III tersebut menjadi alat analitis kritis untuk mengkaji pelaksanaan Program Pendidikan Wajib Diniyah. Program ini merupakan kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Bandung yang berlandaskan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pendidikan Wajib Diniyah (2008). Kebijakan ini dihadirkan sebagai wujud kepedulian pemerintah daerah dalam membentengi dan memperkuat fondasi moral serta spiritual generasi muda di tengah arus modernisasi. Melalui wahana Madrasah Diniyah Takmiliyah, program ini dirancang untuk memberikan pendalaman materi-materi keislaman yang tidak dapat ditampung secara optimal dalam jam pelajaran agama di sekolah formal yang terbatas. Salah satu pilar dan prioritas utama dari pelaksanaan program ini adalah pembinaan literasi dan pemahaman terhadap kitab suci Al-Qur'an. Lembaga Madrasah Diniyah Takmiliyah Bintang Raya sebagai salah satu unit pelaksana bertugas mentransformasikan mandat regulasi Perda tersebut ke dalam kegiatan pembelajaran harian, pengajaran tajwid, bimbingan tahsin, serta penanaman makna ayat-ayat Al-Qur'an kepada peserta didik, khususnya kelas VI yang sedang berada pada fase transisi menuju jenjang pendidikan menengah.

Keberhasilan dari rangkaian proses implementasi program pada akhirnya diukur berdasarkan tingkat ketercapaian pada variabel hasil (outcome), yaitu perkembangan pemahaman bacaan Al-Qur'an peserta didik. Pemahaman merupakan proses kognitif yang menempati hierarki lebih tinggi dibandingkan sekadar kemampuan mengingat atau melafalkan teks secara mekanis. Peserta didik yang memiliki pemahaman tidak hanya mampu mengucapkan lafaz-lafaz Al-Qur'an dengan benar sesuai hukum tajwid, tetapi juga sanggup menyerap makna, menangkap pesan moral, serta menghubungkan ajaran Al-Qur'an dengan konteks kehidupannya. Menurut Nana Sudjana, pemahaman kognitif seseorang dalam

proses belajar dapat dikategorikan dan diukur melalui tiga tingkatan indikator utama, yaitu menerjemahkan, menafsirkan, dan mengekstrapolasi.

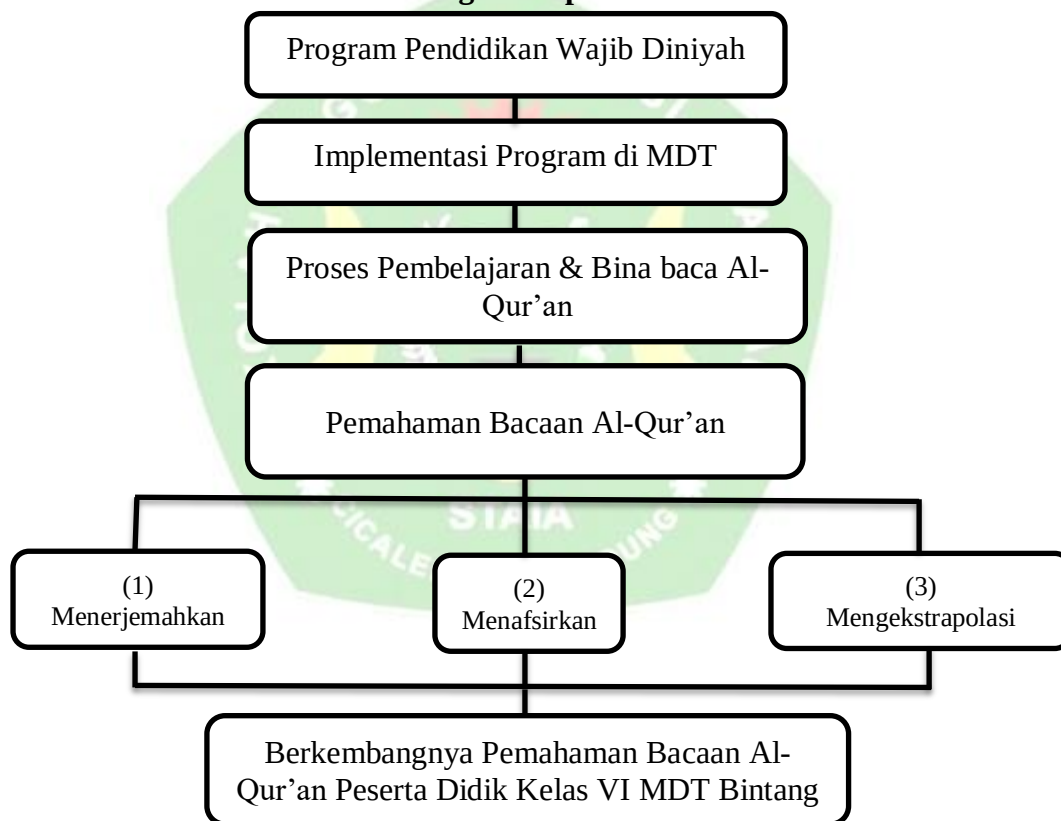
1. Tingkatan pemahaman yang pertama adalah menerjemahkan (*translating*). Kemampuan menerjemahkan merupakan tingkatan pemahaman paling dasar di mana peserta didik mampu mengalihbahasakan kata, frasa, atau ayat-ayat Al-Qur'an ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa ibu yang mudah dipahami. Indikator ini mencakup kemampuan peserta didik kelas VI dalam mengenali kosakata penting dalam ayat, mengartikan perkata (*tarjamah lafdziyyah*), serta menyusun terjemahan kalimat secara utuh tanpa mengubah makna mendasar dari ayat Al-Qur'an yang dipelajari.
2. Tingkatan pemahaman yang kedua adalah menafsirkan (*interpreting*). Tingkat pemahaman ini berada di atas kemampuan menerjemahkan, di mana menafsirkan melibatkan kemampuan peserta didik dalam menguraikan kandungan makna, mengidentifikasi ide pokok atau pesan utama, serta menjelaskan maksud tersirat dari suatu ayat Al-Qur'an dengan menggunakan bahasa dan kalimatnya sendiri. Dalam pembelajaran di Madrasah Diniyah Takmiliyah Bintang Raya, indikator ini terlihat saat peserta didik mampu menjelaskan alasan diturunkannya ayat secara sederhana, menjelaskan pesan moral tentang perintah ibadah atau larangan perbuatan tercela, serta membandingkan kandungan satu ayat dengan ayat lainnya yang relevan.
3. Tingkatan pemahaman yang ketiga adalah mengekstrapolasi (*extrapolating*). Mengekstrapolasi merupakan tingkatan pemahaman tertinggi yang menuntut kemampuan berpikir analitis dan aplikatif. Indikator ini menggambarkan sejauh mana peserta didik sanggup meramalkan, menarik kesimpulan, serta memperluas konsekuensi logis dari nilai-nilai Al-Qur'an ke dalam situasi kehidupan nyata. Peserta didik yang mencapai tahap ini tidak hanya paham apa pesan ayat tersebut, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan tindakan sehari-hari, seperti menerapkan nilai kejujuran, menghormati orang tua, menjaga kebersihan, dan menjalankan kewajiban salat fardu sebagai perwujudan konkret dari pemahaman atas ayat-ayat Al-Qur'an yang dibacanya.

Berdasarkan kajian teoretis tersebut, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun atas dasar alur logika kausalitas kualitatif yang menghubungkan regulasi pemerintah, manajemen pelaksanaan di lapangan, dan capaian perkembangan belajar peserta didik. Titik tolak penelitian ini dimulai dari adanya kerangka kebijakan Program Pendidikan Wajib Diniyah berdasarkan Perda Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2008. Kebijakan ini bernilai ideal, namun keberhasilannya sangat bergantung pada bagaimana proses implementasi program dijalankan di tingkat operasional oleh Madrasah Diniyah Takmiliyah Bintang Raya. Mengacu pada Teori George C. Edward III, efektif atau tidaknya implementasi pengajaran Al-Qur'an di Madrasah Diniyah Takmiliyah Bintang Raya ditentukan oleh keterpaduan empat variabel proses, yaitu sejauh mana informasi dan sasaran kurikulum dikomunikasikan secara transparan, seberapa cukup dukungan ustaz yang kompeten beserta sarana Al-Qur'an dan modul ajar, seberapa tinggi komitmen dan disposisi para ustaz dalam membimbing santri, serta seberapa tertata struktur birokrasi, jadwal, dan instrumen evaluasi pembelajaran yang diterapkan. Apabila keempat faktor implementasi tersebut beroperasi secara sinergis, maka proses pembelajaran dan bimbingan bacaan Al-Qur'an di ruang kelas akan berlangsung secara terstruktur, terarah, dan berkualitas. Pendidik tidak sekadar mengajarkan kaidah membaca, tetapi juga memfasilitasi diskusi makna dan pembiasaan hafalan beserta artinya.

Dampak langsung dari proses implementasi yang berjalan optimal tersebut adalah terwujudnya perkembangan pemahaman bacaan Al-Qur'an peserta didik kelas VI di Madrasah Diniyah Takmiliyah Bintang Raya. Perkembangan pemahaman ini terefleksikan secara bertahap melalui kemampuan santri dalam menerjemahkan kosakata ayat, menafsirkan pesan moral kandungan ayat, hingga mengekstrapolasi ajaran Al-Qur'an dalam perilaku akhlakul karimah sehari-hari. Muara dari seluruh keterkaitan sistematis ini adalah terwujudnya output penelitian berupa berkembangnya pemahaman bacaan Al-Qur'an peserta didik secara optimal. Secara keseluruhan, alur pemikiran ini menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan Diniyah sangat bergantung pada keselarasan seluruh elemen organisasi di lapangan. Ketika proses implementasi yang mencakup komunikasi,

sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi berjalan dengan harmonis, maka kegiatan pembelajaran Al-Qur'an akan berlangsung efektif dan terarah. Hal ini secara langsung memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kemampuan kognitif peserta didik dalam menyerap, mengartikan, serta mengaplikasikan pesan-pesan suci Al-Qur'an. Untuk memberikan gambaran yang lebih rinci, jelas, dan sistematis mengenai keterkaitan logis antara variabel implementasi program dengan pengembangan pemahaman bacaan Al-Qur'an peserta didik kelas VI di Madrasah Diniyah Takmiliyah Bintang Raya, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini disajikan melalui bagan berikut:

Gambar 1.1
Kerangka Berpikir



F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian tentang implementasi program pendidikan wajib diniyah dalam meningkatkan pemahaman bacaan Al-Qur'an pada peserta didik sudah pernah dilakukan sebelumnya. Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini. Pada penelitian ini, peneliti akan

membahas mengenai implementasi Program Pendidikan Wajib Diniyah dalam mengembangkan pemahaman bacaan Al-Qur'an peserta didik kelas Vi di MDT Bintang Raya. Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian saat ini sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Wajib Madin di Sekolah Dasar Muhammadiyah 3 Pandaan (Dian Sukmawati, 2025), Artikel ini mengkaji implementasi kebijakan Wajib Madrasah Diniyah di SD Muhammadiyah 3 Pandaan dengan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Madin telah terintegrasi dengan baik sebagai bagian dari pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam dan mendapat respons positif dari siswa. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan tenaga pengajar yang kompeten, kurangnya sosialisasi kebijakan, serta belum meratanya legalitas Madrasah Diniyah. Secara keseluruhan, artikel ini menegaskan bahwa kebijakan Wajib Madin memiliki potensi besar dalam penguatan karakter siswa, tetapi memerlukan dukungan yang lebih optimal dari pemerintah, sekolah, dan masyarakat agar pelaksanaannya berjalan lebih efektif.
2. Efektivitas Madrasah Diniyah dalam Meningkatkan Pendidikan Agama Islam dan Akhlak pada Anak Usia Sekolah (Basiran, 2023). Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif pada Madrasah Diniyah Takmiliah Nururrohman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan diniyah berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan agama dan pembentukan akhlak peserta didik sekolah dasar. Keefektifan pembelajaran diukur melalui keterlibatan peserta didik, tanggapan terhadap materi, dan pemahaman konsep yang menunjukkan hasil positif meski dibarengi rekomendasi untuk perbaikan kurikulum, fasilitas, dan metode pengajaran guna meningkatkan kualitas pembelajaran diniyah.
3. Integrating Madrasah Diniyah into Secondary Schools: A Case Study of Local Religious Curriculum in Indonesia (Nur Alfiah, 2025). Penelitian ini mengevaluasi integrasi kurikulum pendidikan diniyah ke dalam sekolah

menengah di Jombang sebagai muatan lokal. Hasilnya menunjukkan bahwa integrasi tersebut memberikan dampak positif pada karakter religius peserta didik, kompetensi ibadah, dan pemahaman keagamaan. Riset menggarisbawahi pentingnya konteks lokal dalam implementasi kurikulum diniyah dan pendekatan yang kontekstual.

4. Efektivitas Integrasi Muatan Lokal Pendidikan Diniyah Dalam Peningkatan Kemampuan Pendidikan Agama Islam Peserta Didik (Studi Kasus di SMPN 5 Jombang) (Afif, 2024). Penelitian kasus ini membahas integrasi muatan lokal pendidikan diniyah di SMP Negeri 5 Jombang. Temuan menunjukkan bahwa muatan lokal diniyah yang terstruktur berdampak positif terhadap kemampuan peserta didik dalam Pendidikan Agama Islam, terlihat dari peningkatan nilai rata-rata PAI dan perilaku religius peserta didik, seperti disiplin dalam ibadah. Kajian ini menunjukkan bahwa pengelolaan diniyah yang matang dalam kurikulum sekolah formal mampu menguatkan pemahaman dan aplikasi nilai keagamaan.
5. Pengaruh Pembelajaran Madrasah Diniyah Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Pai Kelas VIII Di SMP Al Munawwariyah Bululawang Malang (Khoirunnisa, 2023). Berdasarkan pembahasan dalam skripsi-skripsi terdahulu yang mengkaji pendidikan wajib diniyah atau madrasah diniyah takmiliyah, dapat disimpulkan bahwa program pendidikan diniyah memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman agama Islam peserta didik, khususnya pada aspek pengetahuan dasar keislaman, kemampuan membaca Al-Qur'an, pemahaman ibadah, serta pembentukan sikap dan akhlak religius. Peserta didik yang secara konsisten mengikuti pendidikan diniyah cenderung lebih mampu dalam aspek pengetahuan dasar keislaman, dan kemampuan membaca Al-Qur'an.

Berdasarkan sintesis dari berbagai penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, tampak jelas bahwa keberadaan Madrasah Diniyah Takmiliyah memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam menguatkan pemahaman agama Islam, meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an, serta membentuk sikap

religius peserta didik. Kendati demikian, mayoritas studi terdahulu masih berfokus secara sempit pada aspek keefektifan pembelajaran mikro, evaluasi hasil belajar akademik siswa pada mata pelajaran PAI, serta integrasi kurikulum diniyah sebagai muatan lokal di sekolah formal. Terdapat celah penelitian (*research gap*) yang cukup krusial dan belum terjangkau secara mendalam oleh para peneliti sebelumnya. Studi-studi yang ada belum secara spesifik menempatkan Madrasah Diniyah sebagai wujud nyata implementasi kebijakan publik daerah yang berdiri sendiri secara mandiri di tengah masyarakat, khususnya dalam mengukur tingkat kepatuhan, mekanisme kelembagaan, serta dinamika partisipasi siswa dalam memenuhi kualifikasi Wajib Diniyah. Selain itu, analisis mengenai hambatan kontekstual di tingkat lokal seperti pergeseran fokus belajar anak akibat dampak perkembangan teknologi dan media digital masih sangat jarang disandingkan secara langsung dengan indikator keefektifan pemahaman keagamaan peserta didik di lembaga nonformal.

Kesenjangan literatur tersebut menjadi titik pijak utama bagi kebaruan (*novelty*) yang ditawarkan dalam penelitian ini. Berbeda dengan riset terdahulu yang umumnya berpusat pada integrasi diniyah di sekolah formal atau evaluasi kebijakan publik secara umum, penelitian ini menghadirkan perspektif baru dengan meneliti secara komprehensif keefektifan Program Pendidikan Wajib Diniyah langsung pada lokus utamanya, yaitu di MDT Bintang Raya Cikancung. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan holistik yang tidak hanya mengukur dimensi kognitif Pemahaman Bacaan Al-Qur'an peserta didik Kelas VI sebagai luaran program, tetapi juga membongkar dinamika implementasi kebijakan wajib diniyah di tingkat basis. Penelitian ini menelaah secara kritis bagaimana regulasi daerah diinternalisasikan oleh lembaga madrasah diniyah, bagaimana sinergi antara pengelola madrasah dan orang tua dibangun, serta bagaimana strategi lembaga dalam mengatasi kendala partisipasi siswa di era digital. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis maupun praktis yang membedakannya secara jelas dari penelitian-penelitian terdahulu, sekaligus menyajikan gambaran utuh mengenai keefektifan program wajib diniyah dalam membina generasi muda yang paham akan nilai-nilai keislaman.